

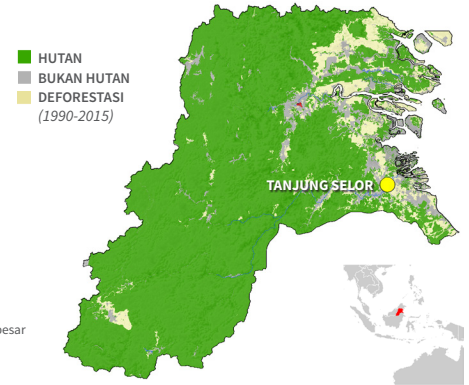


### SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN RENDAH EMISI (LED-R)

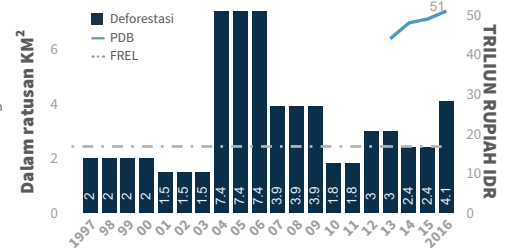
- Provinsi termuda di Indonesia, terbentuk pada tahun 2012 (sebelumnya merupakan bagian dari Kalimantan Timur)
- 30% dari penduduk Kaltara adalah transmigran yang berasal dari provinsi-provinsi lain. Transmigran yang datang belakangan menetap di daerah perkotaan; pertumbuhan penduduk → konversi lahan pertanian, produksi berkurang & meningkatnya ketergantungan akan impor
- 90% wilayah Kaltara berstatus sebagai kawasan hutan lindung, konservasi, & produksi
- 62% dari produksi pertanian Kaltara adalah kelapa sawit
- Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), salah satu wilayah konservasi terbesar di Asia Tenggara dan bagian penting dari Inisiatif Heart of Borneo, meliputi >15% dari yurisdiksi Kaltara (13.600 km<sup>2</sup>)
- Gajah Kalimantan di hutan Sebuku adalah spesies yang dilindungi peraturan perundang-undangan dan bernilai tinggi secara kultural, namun konflik gajah-manusia meningkat akibat ekspansi kelapa sawit ke habitat mereka

- PENDORONG DEFORESTASI**
- 🚧 Pembangunan infrastruktur
  - 🐟 Perikanan
  - 🏭 Pertambangan skala industri
  - 🪚 Penebangan hutan legal skala besar
  - 🚜 Perkebunan skala besar

- EMISI TAHUNAN RATA-RATA DARI DEFORESTASI** 11,33 Mt CO<sub>2</sub> (2010-2015)  
Termasuk biomassa di atas tanah & dekomposisi gambut
- LUAS KAWASAN** 68.996 km<sup>2</sup>
- POPULASI** 716.407 (2018)
- IPM** 69,84 (2017)
- PDB** 4,1 miliar dollar AS (2017)
- GINI** 0,303 (2018)
- KEGIATAN EKONOMI UTAMA**
- 🐟 Budidaya ikan
  - 🪚 Ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan
  - 🚧 Konstruksi
- POPULASI DESA/KOTA** 65%/35%



Sumber data: Sosial-ekonomi: BPS  
Deforestasi: Disarikan dari data Kementerian Kehutanan

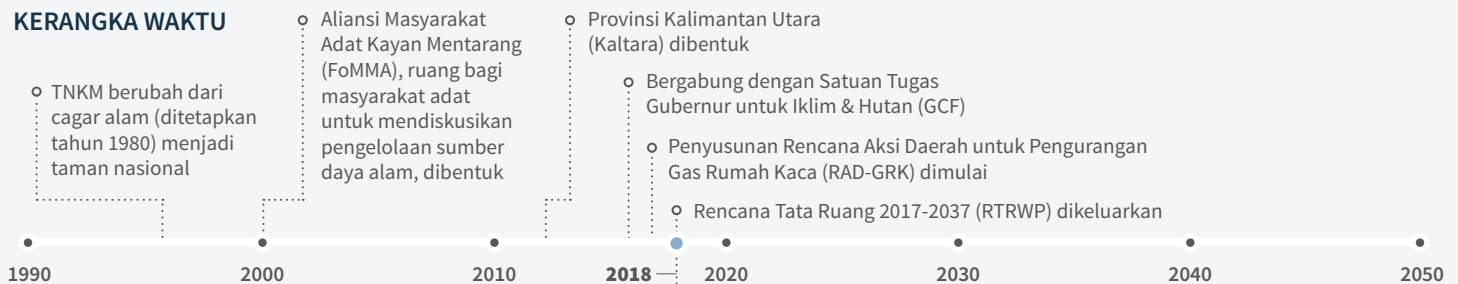


### SOROTAN INOVASI

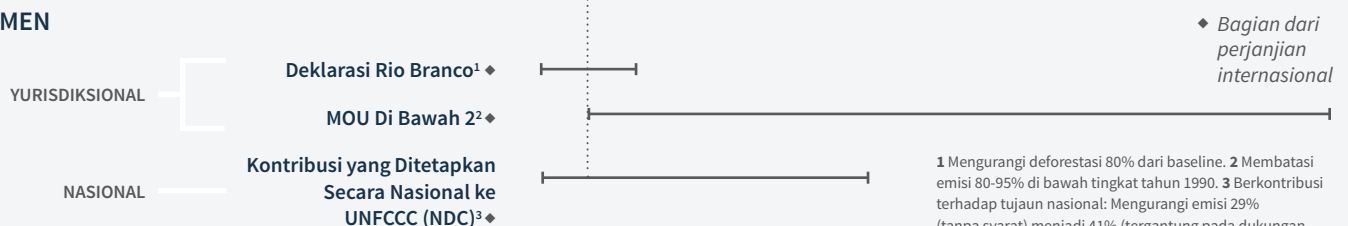
**Revitalisasi Delta Kayan-Sembakung (DKS)** ditujukan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal melalui budidaya udang sekaligus upaya konservasi ekosistem mangrove yang merupakan kunci untuk mitigasi perubahan iklim dan ketahanan iklim. Budidaya udang macan di DKS mulai berkembang pesat pada periode tahun 1990an & saat ini merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDB provinsi. Dengan tidak adanya pengaturan dan pengawasan pemerintah, tambak udang telah merambah ke kawasan hutan lindung dan lebih dari 70.000 hektar tambak udang saat ini berlokasi di dalam kawasan hutan lindung, penebangan mangrove serta perusahaan ekosistem telah meningkatkan kerentanan wilayah ini terhadap erosi dan badai. Pemerintah provinsi, bekerja sama dengan WWF, FORCLIME, kelompok nelayan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, tengah berusaha mengatasi permasalahan ini dengan membentuk

kelompok kerja untuk membantu petambak udang melalui pemberian bantuan teknis, peningkatan pengetahuan dan pemasaran, dan restorasi mangrove. Petambak udang dapat mempelajari praktik-praktik budidaya udang terbaik dan menerima bantuan untuk mendapatkan sertifikasi produk berkelanjutan (yang akan sangat dihargai oleh pembeli). Saat ini, proyek tersebut berupaya menyelesaikan isu legalitas petambak udang di dalam DKS dengan mengajukan izin perhutanan sosial kepada pemerintah nasional yang akan memungkinkan petambak dan masyarakat adat untuk mengelola wilayah tersebut dan sumber daya yang ada di dalamnya secara kolaboratif. Dalam proses penyiapan DKS, pemetaan dan penataan batas tambak ikan serta pembentukan kelompok petani hutan dilakukan secara beriringan. Suatu kelompok petani hutan terdiri atas 15–20 petambak udang yang lokasinya saling berdekatan untuk bersama-sama mengelola hutan.

#### KERANGKA WAKTU



#### KOMITMEN



1 Mengurangi deforestasi 80% dari baseline. 2 Membatasi emisi 80-95% di bawah tingkat tahun 1990. 3 Berkontribusi terhadap tujuan nasional: Mengurangi emisi 29% (tanpa syarat) menjadi 41% (tergantung pada dukungan internasional) di bawah BAU

# INTERVENSI UTAMA

✕ DISINSENTIF    📅 LANGKAH-LANGKAH PEMUNGKIN    🏆 INSENTIF



1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3 Bank Pembangunan Asia/Asian Development Bank (ADB). 4 Bank Pembangunan Jerman/KfW German Development Bank, GIZ Forests & Climate Change Programme (FORCLIME), Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia/Swedish International Development Cooperation Agency. 5 PT. Ratah Timber, PT. Sari Bumi Kusuma, IKEA, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 6 Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas). 7 Kelompok Kerja Provinsi (Pokjapro). 8 Kelompok Kerja Kabupaten (Pokjakab). 9 The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS), Borneo Ecology and Biodiversity Conservation Institute (BEBASIC), Tropenbos InterNasional, WWF-Indonesia, The Nature Conservancy, Global Forest & Trade Network (GFTN), The Borneo Initiative. 10 Universitas Nasional, Institut Pertanian Bogor, Universitas Tanjungpura, Universitas Palangkaraya, Universitas Mulawarman, Universitas Gadjah Mada. 11 Dinas/Badan Lingkungan Hidup tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. 12 WWF-Indonesia. 13 Universitas Tarakan. 14 FORCLIME. 15 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

## PERKEMBANGAN KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL

🟡 AWAL    🟢 MENENGAH    🟣 LANJUT

<b>Strategi LED-R yang Terintegrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa unsur strategi LED-R berada pada tahap awal pengembangan melalui berbagai inisiatif (misalnya FORCLIME REDD+)</li> <li>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (RPJMD) menyebutkan pembangunan berkelanjutan; integrasi perubahan iklim &amp; penyediaan jasa lingkungan tidak jelas</li> </ul>
<b>Rencana tata ruang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan adat terintegrasi ke dalam RTRWP &amp; RTRWP telah mempertimbangkan ekologi &amp; mitigasi</li> </ul>
<b>Target pelaksanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi provinsi ke NDC tengah berada di tahap awal pendefinisian</li> <li>RAD-GRK sedang dikembangkan, akan menetapkan target pengurangan emisi</li> </ul>
<b>Monitoring, pelaporan &amp; verifikasi (MRV)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emisi historis % emisi potensial di masa depan sedang dikumpulkan &amp; diperhitungkan</li> <li>Tingkat acuan yurisdiksional akan dikembangkan dengan mengacu pada metode tingkat nasional</li> </ul>
<b>Kebijakan &amp; insentif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RPJMD menetapkan tujuan peningkatan akses terhadap infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi</li> <li>Pemerintah provinsi mendukung &amp; mendorong pembangunan sumber-sumber energi alternatif (misalnya hydropower, tumbuhan penghasil biomassa, pembangkitan energi melalui tanaman/limbah kelapa sawit) untuk mengurangi ketergantungan akan batubara</li> </ul>
<b>Tata kelola para pemangku kepentingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Pembina, Pengendali, dan Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TN Kayan Mentarang melibatkan masyarakat adat (diwakili oleh FoMMA), instansi pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten untuk mengelola sumber daya di dalam dan di sekitar Taman Nasional secara kolaboratif – Forum Revitalisasi DKS melibatkan masyarakat adat dan masyarakat pesisir, sektor privat, asosiasi nelayan, pemerintah provinsi, dan LSM</li> </ul>
<b>Pertanian berkelanjutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FORCLIME &amp; LSM mendukung nelayan &amp; petani untuk memetakan dan menentukan batas lahan mereka; hasilnya akan didorong untuk diintegrasikan ke dalam RTRWP dan Inisiatif Satu Peta</li> <li>FORCLIME &amp; dinas kehutanan lokal mengembangkan upaya untuk mengubah tambak-tambak udang yang berlokasi di dalam DKS menjadi skema perhutanan sosial (silvo-akuakultur) untuk memberikan kepastian tenurial &amp; memungkinkan dilakukannya sertifikasi keberlanjutan</li> </ul>
<b>Masyarakat adat &amp; Komunitas lokal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak-hak masyarakat adat diakui di dalam RTRWP melalui 3 jenis penetapan lahan: kawasan lindung, kawasan budaya &amp; hutan adat; belum diimplementasikan</li> <li>3 dari 4 kabupaten telah memiliki peraturan yang mendukung hak-hak masyarakat adat untuk mengelola hutan warisan nenek moyang</li> </ul>
<b>Pembiayaan LED-R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HoB tengah mengembangkan skema pendanaan berkelanjutan yang berasal dari lembaga-lembaga pendanaan multilateral, pemerintah, sektor swasta, dan/atau LSM &amp; Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan (PES)</li> </ul>

## TANTANGAN & PELUANG

### TANTANGAN

- Pemerintah provinsi kekurangan dana & kapasitas untuk mengelola hutan yang luas atau melibatkan pemangku kepentingan
- Kerangka kebijakan LED-R tingkat provinsi kurang memadai karena provinsi ini baru terbentuk
- FoMMA, pemain kunci dalam pengelolaan kolaboratif TNKM menghadapi tantangan besar dalam hal kapasitas, pendanaan & akses terhadap wilayah-wilayah masyarakat adat & membutuhkan dukungan terus-menerus dari pemerintah dan donor

### PELUANG

- Hutan & mangrove yang luas berada di wilayah konservasi & dikelola bersama oleh pemerintah, masyarakat adat dan lokal, memberikan peluang untuk mengurangi emisi
- Bergabungnya Kaltara sebagai anggota GCF baru-baru ini menunjukkan ketertarikan pemerintah dalam mendorong kebijakan dan program-program LED-R
- Adanya dukungan dari mitra & donor (misalnya HoB, FORCLIME) dapat mendorong LED-R lebih jauh
- Jalan-jalan baru dan perbaikan Jalan Tol Trans-Kalimantan pada tahun 2022 akan menghubungkan Kaltara dengan Sabah, Malaysia – peluang katalis bisnis dan pembangunan ekonomi meskipun dampak terhadap lingkungan hidup belum jelas

**KUTIPAN** | M. Komalasari, S. Peteru, S. Atmadja. 2018. "Kalimantan Utara, Indonesia" dalam C. Stickler et al. (Eds.), *Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional*. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.

**REFERENSI DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI** [www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability](http://www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability) 2019/01/03

TIM TEKNIS



DIDUKUNG OLEH



based on a decision of the German Bundestag